

PENGANTAR REDAKSI

Pembaca yang terhormat,

Reformasi birokrasi dan perbaikan pelayanan publik mendorong terbentuknya paradigma baru dalam Administrasi Publik.

Gerakan reformasi pada awal tahun 1990-an diilhami oleh banyak tekanan masyarakat tentang perlunya peningkatan kualitas pelayanan publik. Pentingnya peningkatan kualitas pelayanan publik ditindaklanjuti pemerintah dengan dikeluarkannya Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1995 tentang Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah Kepada Masyarakat dan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No. 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Reformasi Administrasi Publik adalah suatu usaha melakukan perubahan-perubahan pokok atau inovasi-inovasi sistem birokrasi yang bertujuan merubah struktur dan perilaku dalam Sistem Administrasi Publik. Sehingga Sistem Administrasi Publik menjadi badan atau agen yang efektif bagi perubahan sosial, ekonomi, politik, keadilan sosial, dan desentralisasi dalam akselerasi pembangunan bangsa. Melalui reformasi, Sistem Administrasi Publik akan berjalan sesuai prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Reinventing Government*.

Dialogue, Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik Program Studi Magister Administrasi Publik (MAP) Universitas Diponegoro, di penerbitan kali ini menyajikan reformasi birokrasi di bidang manajemen, administrasi publik, dan kebijakan publik, yang meliputi : otonomi daerah, keuangan daerah, penataan ruang kota berkelanjutan, pelayanan publik, dan pemberdayaan birokrasi.

Para penulis artikel tersebut berasal dari berbagai kalangan yaitu praktisi, akademisi, dunia usaha, dan alumni MAP UNDIP.

Semoga jurnal ini semakin melengkapi perkembangan Ilmu Administrasi, Manajemen, dan Kebijakan publik.

SALAM DARI REDAKSI